

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu kantor atau instansi pemerintah merupakan salah satu penggerak perekonomian didalam suatu negara. Maka akan memerlukan suatu penanganan yang baik, terutama menyangkut dalam penanganan masalah keuangan dalam suatu instansi pemerintahan. Hal tersebut erat kaitannya dengan menyangkut jumlah pegawai sebagai orang yang bisa mewujudkan suatu tujuan dalam penanganan yang baik untuk masalah keuangan. Dalam hal ini adalah pegawai, menurut Robbins (Perilaku Organisasi, Edisi 10 : 2006) pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja.

Peran serta seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sangat mendukung suatu pencapaian suatu instansi. Untuk pencapaian tujuan instansi dibutuhkan adanya balas jasa atau pembayaran gaji yang sesuai bagi pegawai yang dapat menjadi salah satu usaha untuk memacu kinerja pegawai.

Aktifitas pengajian merupakan kegiatan suatu instansi pemerintah untuk mengatur jumlah gaji yang seharusnya dikeluarkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pemberian gaji. Pemberian gaji pada pegawai bertujuan untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja. Dengan adanya sistem akuntansi pengajian yang baik dapat meningkatkan aktifitas pengajian disuatu instansi pemerintah.

Efisiensi aktifitas pengajian akan lebih memadai apabila instansi pemerintah telah mengatur prosedur penggajian dengan menggunakan sistem akuntansi penggajian yang telah terkomputerisasi sehingga data yang dihasilkan akan lebih cepat, tepat, dan akurat hasilnya. Agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan maka harus dilakukan pemisahan tugas antar bagian yang terkait untuk menghindari persekongkolan, untuk menghindari jumlah gaji yang dibesarkan dan untuk memudahkan pekerjaan bagi petugas yang disertai tugas perhitungan gaji.

Hal terpenting dalam perubahan struktur anggaran wajib menyusun APBN atau APBD secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Artinya, setiap dana yang dialokasikan dalam APBN atau APBD harus dapat dikeluarkan sesuai dengan aturan yang berlaku agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam bidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sesuai amanat Pasal 31 Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Daerah wajib melaporkan seluruh data keuangan daerah yang terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selanjutnya diberikan kepada DPRD selambat – lambatya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan harus dapat meliputi LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan beban gaji pada instansi pemerintah cukup besar yang harus dikeluarkan tiap bulannya, maka prosedur penggajian harus dilakukan secara efisien. Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai prosedur penggajian pada pegawai dalam sebuah tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pada Pengadilan Negeri Sawahlunto”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas penulis ingin mengetahui masalah tentang bagaimana “Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Gaji dan Tunjangan pada Pegawai Pengadilan Negeri Cabang Sawahlunto”

1.3 Tujuan Magang

Salah satu mata kuliah wajib yang dilakukan oleh mahasiswa Program Diploma yaitu magang. Magang adalah momen dimana mahasiswa membantu atasan dalam berbagai pekerjaan yang bermanfaat. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam praktek kerja/magang ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- a. Untuk Melengkapi SKS sesuai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Mensinkronkan antara teori yang dipelajari dengan praktek dilapangan kerja.
- c. Untuk mempraktekan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan ke lapangan kerja.
- d. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui prosedur penatausahaan pengeluaran gaji dan tunjangan pada pegawai Pengadilan Negeri Sawahlunto.
- b. Untuk mengetahui pihak-pihak apa saja yang terkait dalam prosedur penatausahaan pengeluaran gaji dan tunjangan pada pegawai Pengadilan Negeri Sawahlunto.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang ini adalah :

1. Bagi penulis

- a. Untuk dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur penatausahaan pengeluaran gaji dan tunjangan.
- b. Dapat menerapkan teori yang diperoleh dengan yang terjadi dilapangan.
- c. Menambah wawasan dan pengalaman dalam berinteraksi dilingkungan kerja.
- d. Membentuk kepribadian yang bertanggungjawab dan tangguh yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.

2. Tempat Magang

- a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan upaya untuk meningkatkan prosedur pelaksanaan pengeluaran gaji dan tunjangan.
- b. Bermanfaat untuk instansi pemerintah menyelesaikan tugasnya.
- c. Sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun non akademis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman, maka sistematika dalam penulisan laporan ini disusun dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Menguraikan secara ringkas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang umum maupun khusus, manfaat

magang bagi penulis maupun bagi tempat magang, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka teori. Menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan pengeluaran.

BAB III Gambaran umum. Menguraian gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Sawahlunto.

BAB IV Pembahasan. Menjelaskan tentang bagaimana hasil atau data yang didapat selama praktek lapangan tentang prosedur pengeluaran gaji dan tunjangan.

BAB V Kesimpulan. Menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dari pelaksanaan praktek lapangan yang dilakukan

